



KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN  
FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT

TESIS

**Disusun**  
**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2**  
**Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :  
**Rudhy Fluorentinus Dewanto, SH.**  
**B4B005213**

PEMBIMBING :  
**R. Suharto, SH. M.Hum.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2009**

**KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN  
FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT**

Disusun Oleh :  
**Rudhy Fluorentinus Dewanto, SH**  
**B4B005213**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 17 Pebruari 2009**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Magister  
Kenotariatan UNDIP

**R. Suharto, SH.M.Hum**  
**NIP: 130529429**

**H. Kashadi, SH.MH**  
**NIP: 131124438**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

1. *Perkataan Orang Percaya akan merubah situasi sulit menjadi baik karena ia percaya kepada otoritas Bapa di dalam Kristus yang sanggup mengubah keadaan sesulit apapun. Kuncinya PERCAYA! Bukan Asumsi.*
2. *Pencobaan dan Penderitaan bukan penghalang dalam hidup ini untuk kita semakin erat bersama Tuhan, yang pasti Tuhan selalu beserta kita.*

### TESIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. *Tuhan Allahku, yang senantiasa memberikan Kasih dan AnugerahNya yang sungguh amat besar, dimana aku sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelenahan.*
2. *Kedua Orang Tuaku, Papa yang sudah dipanggil Tuhan dan Mama tersayang, bagiku diantara manusia yang pernah kukenal, yang telah memberikan semua pengorbanan untuk aku dan keberhasilanku.*
3. *Kesembilan kakak-kakakku beserta keluarganya, Mas Chris, Mas Ari, Mas Yus, Mas Hendri, Mas Tomi, Mbak Eli, Mbak Tutut, Mas Chandra, Mas Yosi, yang telah banyak mengisi waktu kosongku selama 34 tahun, membuat aku merasa tak sendiri, serta mengajari aku untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dalam segala hal.*
4. *Istriku tercinta dan Anakku, Elisabeth Graciana, yang dengan cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tak terhingga telah mengajari aku akan segala yang terlewat, terlupa, dan tentunya yang terbaik,*
5. *Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2005.*
6. *Almamater Universitas Diponegoro Semarang.*

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Rudhy Fluorentinus Dewanto, SH, dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi atau lembaga Pendidikan lainnya manapun.

Pengesahan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya, dijelaskan semuanya dalam tulisan dan daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Januari 2009

Yang membuat

Rudhy Fluorentinus D, SH

## KATA PENGANTAR

Puji dan Ucapan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Allahku, yang telah memberikan Berkah dan AnugerahNya, sehingga penulisan tesis ini yang berjudul : **KEDUDUKAN KREDITUR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Gambaran secara umum tesis ini adalah mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia apabila Debitur Pailit menurut Pasal 56 Ayat (1), Undang-Undang Kepailitan dan Hak Kreditur selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam Pembersihan harta Pailit Debitur.

Berdasarkan hasil Penelitian penulis mengadakan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dan pencarian data-data, sehubungan dengan perumusan masalah pada tesis ini, yaitu kedudukan Kreditur Sebagai Penerima Jaminan Fidusia apabila Debitur Pailit.

Penulis sangat menyadari, bahwa penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan penting ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah.

2. Bapak H. Kashadi, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, SH, MS, selaku Sekretaris I Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Suteki, SH, Mhum, selaku Sekretaris II Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak R. Suharto, SH, Mhum, selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan tesis ini, yang telah begitu banyak membantu penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Son Haji, SH, MS, selaku Dosen Wali Penulis pada Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak Mukhlis Adlin, SH, selaku Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta, yang terkait langsung dalam memberikan waktu dan kesempatan dalam pengambilan data guna penyusunan tesis ini.
8. Bapak Muhamad Ramdan, SH, Msi, selaku Kasub Bidang Penyuluhan Bantuan dan Konsultasi Hukum di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia DKI Jakarta.
9. Kedua Orang tuaku dan kesembilan kakak-kakakku, yang semuanya sangat aku kasihi dan sayangi.
10. Istriku, Maria Widiastuti dan Gracia anakku yang mendampingi aku dan memberikan aku semangat.

11. Teman-teman seide dan sepemikiran yang sudah banyak membantu memberikan semangat, pendapat dan saran bantuan fisik kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Dan semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Hukum Jaminan Fidusia, yaitu Hukum Perdata pada khususnya.

Semarang, Januari 2009

Penulis

Rudhy Fluorentinus Dewanto, SH

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	15

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia .....	17
1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	17



2. Ciri-ciri Jaminan Fidusia .....	19
3. Sifat-sifat Jaminan Fidusia .....	22
B. Obyek Jaminan Fidusia .....	25
C. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia .....	26
D. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	29
E. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	30
F. Tinjauan Umum tentang Kepailitan .....	32
1. Pengertian Kepailitan .....	32
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam Kepailitan .....	35
3. Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan .....	35
4. Prosedur Permohonan Pengajuan Pailit.....	37
5. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit.....	40
6. Akibat Kepailitan.....	41
7. Berakhirnya Kepailitan .....	45

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktek dalam Hal Debitur Pailit, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan .....	47
2. Hak Kreditur Separatis selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam Pemberesan harta Pailit Debitur apabila ternyata obyek Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi pada debitur pailit .....	66

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

**ABSTRAK**  
**KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUSIA**  
**DALAM HAL DEBITUR PAILIT**

Kepailitan mempunyai akibat bagi seluruh kreditur, tidak terkecuali Kreditur Penerima Jaminan Fidusia. Pengembalian uang Debitur kepada Kreditur dalam hal Debitur dinyatakan Pailit akan sangat tergantung pada kedudukan dari kreditur tersebut. Kedudukan Kreditur Penerima Jaminan Fidusia adalah sebagai Kreditur Preferen. Hak ini tidak hapus karena adanya Kepailitan atau likuidasi Debitur Pemberi Jaminan Fidusia. Kreditur Preferen (*Secured Creditors*) dalam Kepailitan biasanya disebut Kreditur Separatis. Kreditur Penerima Jaminan Fidusia sebagai Kreditur Separatis sangat berkepentingan agar tetap dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi Kepailitan.

Ketentuan perundang-undangan di bidang Kepailitan maupun Undang-undang Jaminan Fidusia yang berlaku saat ini ternyata kurang memberikan perlindungan hukum terhadap Kreditur Penerima Jaminan Fidusia. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui ketentuan yang berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia dalam memberikan perlindungan Hukum bagi Kreditur Penerima Jaminan Fidusia dalam hal debitur pailit dan juga mengetahui hak-hak kreditur apabila dalam pemberesan harta pailit ternyata obyek jaminan sudah tidak ada lagi pada debitur pailit.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis empiris artinya pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas fenomena yaitu memaparkan mengenai penjelasan utang piutang bagi kreditur penerima fidusia berkaitan dengan Hukum Kepailitan dan permasalahannya dalam praktek.

Dari hasil penelitian dalam hal debitur pailit maka eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam bab V Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, berdasarkan bunyi pasal 29 UUJF dalam hak debitur pemberi fidusia cedera janji atau pailit, maka debitur menerima Jaminan Fidusia Yang telah mempunyai / memegang sertifikat fidusia maka dalam atau berhak untuk menjual obyek Jaminan Fidusia. Dalam proses Kepailitan di Pengadilan Niaga, dalam hal obyek Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi, maka Kreditur Penerima Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi, maka Kreditur Separatis tidak memiliki hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya, sehingga untuk mengajukan haknya dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren. Dengan demikian perlu diberikan perlindungan hukum bagi Kreditur Penerima Jaminan Fidusia dalam proses Kepailitan agar tetap dapat melaksanakan sebagai Kreditur Separatis.

**ABSTRACTION**  
**THE POSITION OF CREDITOR AS GUARANTEE FIDUCIA RECEIVER**  
**IN THE CASE OF DEBITOR BANKRUPT**

Bankrupt has effect to all creditors, neither nor creditor can receive guarantee fiducia. The debt returning of debtor to creditor, in the case of debtor are nonis as bankrupt, it's depend on the position of creditor itself. The position of creditors which receives guarantee fiducia is as secure creditor, their rights are not vanished, because there are bankrupting and liquidation of debtor guarantee fiducia receiver. Secure creditors are usually called as separatis creditors. Debtor guarantee fiducia receiving as separatis creditors has responsible in other to can still execute as if as there are not bankrupting.

The act related to the bankrupting or fiducia guarantee act that relevance in this time, actually are not enough give law protection to guarantee fiduci creditors fiducia creditors receiving. The purpose of this thesis are to know the rules related to the guarantee fiducia execution in the case of finishing the property of bankrupt creditots, but this case finally the object of guarantee fiducia on bankrupt debtor are gone then. This thesis use empirical juridis approaching method, this mean that the approaching from point of view of the principles and regulation that relevance in public are characteristic analysis descriptive.

Those clearly describe the phenomena which shelf about claim and obligation to creditors fiducia receiving which are relate to bankrupting act and problems in their practice. According to the research on bankrupting debtor, so guarantee fiducia execution, it's set in act number 42 year of 1999 chapter V about fiducia guarantee, base on article number 29 UUJF in the case of fiducia debtor receiving are fail to keep engagement or bankrupt, then guarantee fiducia creditor receiving, those that hold certificate of fiducia, can or has a right to sell the object of guarantee fiducia. On bankrupting process at justice of commercial, in the case of fiducia guarantee are gone, then separatis creditors has no link to be priority then the other creditors. There it's necessary to give law protection to fiducia guarantee receiving creditors in the case of bankrupting process in other to keep still executing as separatis creditors.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara Pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan Penerima utang (Debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses ini tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan.<sup>1</sup> Jika terjadi demikian, Pasal 1131 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan sebagai berikut :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 3.

<sup>2</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), diterjemahkan oleh R.Subekti dan Tjitrosudibyo, cet. XXVII, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1131

Walau ditegaskan secara demikian, pada prakteknya seorang debitur tidak hanya terikat pada hanya satu macam kewajiban saja. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara disebutkan bahwa :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan<sup>3</sup>.

Bahwa dengan demikian setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya (*asas paritas creditorum*), kecuali ditentukan undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya<sup>4</sup>. Kreditur yang pelunasannya lebih didahulukan disebut sebagai kreditur Preferen Kreditur Preferen ini sering disebut *secured creditors* atau dalam kepailitan biasanya disebut kreditur separatis.

Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Untuk menjamin pelunasan utang dari pihak debitur pada waktunya, seringkali kreditur tidak akan memberi kredit jika tidak ada jaminan, dan perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak mungkin lahir selain

---

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1132.

<sup>4</sup> Sri Soedewi Masyarakat Sofyan, *Hukum benda* (Yogyakarta : Liberty 1981), hal. 32

harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pokok yang mendasari lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitur kepada kreditur<sup>5</sup>

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut UUJF)<sup>6</sup>. Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada Pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminan, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut<sup>7</sup>. Perlindungan kepentingan kreditur terhadap kemungkinan penyalahgunaan debitur yang tetap menguasai benda jaminan diberikan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia. Namun dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa memberikan larangan tertentu, bahwa pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (1) UUJF hanya terbatas pada benda jaminan yang berupa barang persediaan saja. Untuk benda-benda diluar stock barang dagangan berlakulah ketentuan umum tentang fidusia, termasuk apa yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) tersebut diatas<sup>8</sup>. Dengan demikian tidak ada perlindungan hukum terhadap kreditur

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, No. 7 Tahun 1992, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3472, Penjelasan Pasal 8.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 5.

<sup>7</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 157.

<sup>8</sup> Ibid., hal. 226

Penerima Jaminan Fidusia apabila pada saat debitur cidera janji, ternyata stock barang dagangan sebagai jaminan fidusia sudah tidak ada lagi.

Upaya pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, merupakan salah satu alternatif penyelesaian tagihan yang dapat diajukan oleh pihak kreditur. Dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta kekayaan debitur akan dinyatakan sebagai harta pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebutkan Undang-undang Kepailitan) yang menyatakan bahwa “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu”<sup>9</sup>. Kepailitan pada intinya sebenarnya berarti suatu sitaan secara menyeluruh (*algemeen beslag*) atas segala harta benda dari pada si Pailit. Sitaan secara umum ini dilakukan atas semua harta benda daripada si Pailit<sup>10</sup>. Sebagai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang, prosedur kepailitan mempunyai tujuan melakukan pembagian antara para kreditur dari kekayaan debitur. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dan untuk menghentikan sitaan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, No. 37 Tahun 2004, Pasal 21.

<sup>10</sup> Sudargo Gautama, *Komentari Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1998), hal. 3-4



kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur, sesuai dengan hak masing-masing<sup>11</sup>.

Dengan dikabulkannya permohonan kepailitan oleh Pengadilan Niaga, tentunya memberikan dampak tidak hanya terhadap pihak yang dinyatakan pailit, tetapi juga terhadap pihak lain. Diantara pihak yang terkena dampak dikabulkannya permohonan pailit adalah kreditur dari pihak yang dinyatakan pailit. Bagi kreditur, pernyataan pailit terhadap debitur pailit menimbulkan permasalahan mengenai pengembalian utang dari debitur kepada kreditur. Pengembalian utang debitur kepada kreditur dalam hal debitur dinyatakan pailit akan sangat tergantung pada kedudukan dari kreditur tersebut terhadap debitur pailit<sup>12</sup>.

Undang-undang Kepailitan tersebut memberikan pengecualian terhadap kreditur yang mempunyai hak kebendaan, diantaranya Penerima Jaminan Fidusia. Pengecualian tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyebutkan bahwa setiap kreditur Pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik, atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan tersebut memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur pemegang hak kebendaan terhadap asset debitur yang menjadi jaminan utangnya, yang tidak terpengaruh oleh kepailitan yang menimpa debitur. Namun demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Kepailitan No 37 tahun 2004,

---

<sup>11</sup> Kartini Mulyadi, "*Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan*" (Makalah Seminar tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan, oleh Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 29 April 1998).

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998, dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1999), hal. 105.

hak eksekusi kreditur separatis dimaksud, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Disamping itu penjualan benda jaminan fidusia, dibatasi hanya 2 bulan (60 hari), apabila masa tersebut benda jaminan tidak terjual, maka benda jaminan akan dikembalikan ke kurator.

Oleh sebab itu pasal UU Kepailitan tersebut, secara teoritis membatasi hak kreditur, sebagai kreditur Separatis. Kemudian apabila ditinjau lebih lanjut, Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut tidak sepenuhnya memberikan jaminan kepada kreditur Penerima Jaminan Fidusia untuk melaksanakan hak-haknya apabila debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga mengingat barang yang dijaminakan berupa barang bergerak sudah tidak ada lagi pada debitur.

Maka Penulis bermaksud menulis tesis dengan judul **Kedudukan Kreditur selaku Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian tersebut sebelumnya, dalam penelitian ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktek dalam hal Debitur pailit, berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004?
2. Apakah Kreditur Separatis selaku Penerima Jaminan Fidusia tetap memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya dalam pemberesan harta pailit Debitur apabila ternyata obyek Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi pada Debitur Pailit ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan yang berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia dalam memberikan perlindungan hukum bagi Kreditur Penerima Jaminan Fidusia dalam hal Debitur pailit.
2. Untuk mengetahui apabila Kreditur Separatis selaku Penerima Jaminan Fidusia tetap memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya dalam hal pemberesan harta pailit debitur apabila ternyata obyek Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi pada Debitur Pailit.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembangunan Ilmu Pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang hukum Jaminan.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/solusi kepada pihak Kreditur selaku Penerima Jaminan Fidusia apabila Debitur mengalami pailit.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dana merupakan “darah” bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa darah, perusahaan juga akan mati tanpa dana. Dana bagi sebuah perusahaan diperoleh dari berbagai sumber, tergantung dari sumber dana yang diperolehnya, oleh suatu perusahaan dapat berupa modal (equity) dan utang (loan). Dana yang berupa modal diperoleh dari para pendirinya berupa setoran modal pendiri dan

diperoleh dari pemodal (investor) yang menyetorkan dana untuk modal perusahaan setelah perusahaan tersebut berdiri.

Dana yang berupa utang (loan) dapat diperoleh perusahaan tersebut dari sumber-sumber seperti bank-bank, lembaga-lembaga pembiayaan, pasar uang (*financial market*) yang memperjual belikan surat-surat utang jangka pendek seperti *commercial paper*, pasar modal (*capital market*) yang memperjual belikan surat-surat utang jangka panjang (obligasi), atau dari sumber-sumber pembiayaan lainnya. Sumber-sumber pembiayaan yang memberikan utang (loan) kepada perusahaan tersebut disebut para kreditor dari perusahaan itu. Dengan kata lain, perusahaan tersebut merupakan Debitur dari para Kreditor tersebut.

Untuk memperoleh dana berupa utang dari para Kreditor seperti yang telah dikemukakan diatas itu, hanya mungkin dilakukan apabila hukum memberikan perlindungan bagi para Kreditor dalam hal Debitur cidera janji tidak melunasi utang tersebut pada waktunya. Pelunasan atas utang tersebut didapat dari pendapatan perusahaan dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum pendapatan itu dipakai untuk melunasi utang perusahaan, terlebih dahulu pendapatan itu harus dapat menutupi kebutuhan perusahaan dalam rangka pemupukan cadangan perusahaan dan menutupi biaya-biaya perusahaan. Sumber utama pelunasan utang dari pendapatan perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas itu di dalam dunia perbankan disebut *first way out*.

Bagaimana halnya apabila ternyata perusahaan gagal dengan kegiatan usahanya sehingga perusahaan tidak mampu melunasi utang perusahaan? Apabila ternyata perusahaan mengalami kesulitan dalam usahanya sehingga perusahaan

menjadi tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar utang-utangnya, maka para Kreditur harus memperoleh kepastian bahwa hasil penjualan agunan atau hasil likuidasi atas harta kekayaan (*assets*) perusahaan melalui putusan pailit dari pengadilan dapat diandalkan sebagai sumber pelunasan alternatif. Disamping dari hasil penjualan agunan atau likuidasi harta kekayaan penjamin (*quarantor atau borg*), serta barang-barang agunan milik pihak ketiga bila ada, dapat pula menjadi sumber pelunasan bagi utang perusahaan. Sumber pelunasan alternatif ini dalam dunia perbankan disebut *second way out*.

Undang-Undang telah mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *second way out* bagi pemberian utang oleh Kreditur kepada Debitur sebagaimana dikemukakan di atas. Ketentuan mengenai *second way out* itu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa segala harta kekayaan Debitur baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak), baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh Debitur dengan para Krediturnya. Dengan kata lain Pasal 1131 KUH Perdata itu memberikan ketentuan bahwa apabila Debitur cidera janji tidak melunasi utang yang diperolehnya dari para Krediturnya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan Debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya.

Sekalipun Undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada para Kreditur sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH

Perdata tersebut, tetapi perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon Kreditur untuk memberikan utang kepada calon Debitur. Tentulah alan lebih menarik bagi calon Kreditur apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik daripada sekedar perlindungan berupa memperoleh pelunasan secara proporsional dari hasil penjualan harta Debitur. Adakah perlindungan seperti itu didalam sistem hukum kita? Sistem hukum kita ternyata mengenai pemberian perlindungan yang istimewa seperti itu bagi Kreditur. Perlindungan istimewa itu hanya dapat diberikan apabila dipenuhi ketentuan-ketentuan tertentu dan ditempuh proses tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang.

#### **F. Metode Penelitian**

Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan, menentukan, menganalisa suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan yang dihadapi.

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal.6

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah<sup>14</sup>.

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Oleh karena itu untuk menentukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pikiran yang logis sedangkan empirisme memberikan pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran.

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris artinya pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

#### **B. Spesifikasi penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* Jilid I, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena bermaksud menggambarkan secara jelas fenomena yaitu memaparkan mengenai penjelasan utang piutang bagi kreditur penerima fidusia dikaitkan dengan hukum kepailitan dan permasalahannya dalam praktek.

**a. Penelitian Kepustakaan.**

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yang meliputi :
  - a) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hukum Acara Perdata ;
  - b) Berbagai Peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan Kehakiman ;
  - c) Berbagai Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum Jaminan Fidusia dan Hukum Kepailitan
  - d) Yurisprudensi tentang jaminan fidusia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas :
  - a) Kepustakaan yang berkaitan dengan pembebanan, pendaftaran dan eksekusi Jaminan Fidusia ;
  - b) Hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
  - a) Kamus Hukum;



- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Kamus Bahasa Inggris.

## **b. Penelitian lapangan**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer dan data sekunder, data primer berupa pengalaman praktek atau pendapat subyek penelitian tentang segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pendaftaran jaminan fidusia.

Penentuan lokasi penelitian dan subyek lapangan ditentukan sebagai berikut :

### **1) Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam Penelitian ini adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pusat karena banyak kasus tentang Kepailitan yang berhubungan dengan Jaminan Fidusia.

### **2) Populasi**

Populasi adalah wilayah generealisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan menarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pendaftaran Fidusia di Jakarta, Kurator, Pengadilan Niaga, Yuris Bank.

### **3) Tehnik Sampling**

Dalam penelitian tesis ini secara purposive sampling, pengambilan sample dilakukan berdasarkan teknik Non Random Sampling dengan tehnik purposive yaitu pengambilan sample dengan subyek tertentu.

### **4) Responden**

Adapun responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kantor Wilayah Pendaftaran Jaminan Fidusia di Jakarta.
2. 2 (dua) orang Kurator, yang telah berpengalaman selaku kurator selama 5 (lima) tahun
3. 2 (dua) orang yuris Bank di Jakarta, yang Banknya adalah sebagai kreditur Pailit.
4. 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Niaga Jakarta

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, akan diteliti data data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi kegiatan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui teknik interviu/wawancara langsung dengan responden.

Wawancara dilakukan pada Kepala Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Jakarta, 2 (dua) Kurator, 2 (dua) Yuris Bank, pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara telah ditentukan dan disusun serta dapat ditambah atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang dapat berupa buku-buku, tulisan-tulisan serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **D. Metode Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah-masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

BAB I   Pendahuluan terdiri dari : Latar belakang Permasalahan, pokok permasalahan, dan tujuan penelitian

BAB II   Tinjauan Pustaka membahas mengenai tinjauan umum tentang Jaminan Fidusia

BAB III   Metode Penelitian membahas mengenai metode penelitian sistematika penelitian

BAB IV   Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V    Penutup : Kesimpulan dan Saran

- DAFTAR PUSTAKA
- LAMPIRAN

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia**

##### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "*Fiducia cum creditore*" Asser Van Oven menyebutnya "*zekerheids-eigendom*" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "*bezitloos zekerheidsrecht*" (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "*Verruimd Pandbegrip*" (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhooven dalam menyebutnya "*eigendoms overdracht tot zekerheid*" (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah "fidusia" saja<sup>15</sup>.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 90.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung, Citra AdityaBakti, 2000), hal. 3.

Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda<sup>17</sup>. Berdasarkan pasal tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang.

Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia ;

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dalam hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu :

- Debitur pemberi jaminan percaya, benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja;
- Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja;
- Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.

---

<sup>17</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia, disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Dep hukum dan HAM RI, 2002, hal 2.

<sup>18</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002) hal. 160-175.

- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
- e. Hak mendahului (preferen);
- f. Sifat *accessoir*.

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUF dibentuk adalah yurisprudensi *arrest* HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan *Clygnett*<sup>19</sup>.

Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya<sup>20</sup>.

## **2. Ciri-ciri Jaminan Fidusia**

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (pasal 27 UUF).

---

<sup>19</sup> Ibid, hal. 111

<sup>20</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia (PT.Raja Grafindo Persada, Bandung) hal.168.

<sup>21</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hal. 36-37

Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

- b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 UUF).

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.

- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUF).

Untuk memenuhi asas spesialitas dalam ketentuan Pasal 6 UUF, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia ;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia ;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ;
- d. Nilai penjaminan dan ;
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ;

Asas Publisitas dimaksudkan dalam UUF untuk memberikan kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 UUF yang mewajibkan benda yang



dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia<sup>22</sup>.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia<sup>23</sup>.

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUF).

Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertipikat jaminan fidusia, sertipikat jaminan fidusia ditertibkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada Penerima jaminan fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertipikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia<sup>24</sup>.

Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi, atau melalui lembaga parate eksekusi – penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya

---

<sup>22</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, *Op cit.* Hal.139

<sup>23</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, *Loc cit*

<sup>24</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, *Loc cit*

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan dibawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

### **3. Sifat-sifat Perjanjian Jaminan Fidusia**

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUF menyatakan, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat berikut :<sup>25</sup>

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok : Jaminan Fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *accessoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Adapun sifat mendahului (*droit de preference*) dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur

---

<sup>25</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia. Op.cit.* hal.123-124

dalam Pasal 1150 KUH Perdata, hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan Pasal 28 UUF, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi di sini berlaku adagium “*first registered first secured*”<sup>26</sup>.

*Droite de suite* jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droite de suite* yang telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*)<sup>27</sup>. Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

Sehingga dalam perjanjian fidusia kreditur memperjanjikan kuasa/kewenangan mutlak dalam arti bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUH Perdata untuk dalam hal ini debitur wanprestasi.<sup>28</sup>

- Mengambil sendiri benda fidusia ditangan debitur/pemberi fidusia kalau debitur/pemberi jaminan atas tuntutan dari kreditur tidak secara sukarela menyerahkan benda fidusia kepada kreditur ;

---

<sup>26</sup> Ibid, hal. 124

<sup>27</sup> Ibid, hal. 125

<sup>28</sup> J.Satrio. *Op. cit.*, hal. 132.

- Menjual benda tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara di bawah tangan maupun di depan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh lembaga pembiayaan ;
- Dalam hal ada penjualan, menandatangani akta perjanjiannya menerima hasil penjualan tersebut, menyerahkan benda fidusia kepada pembeli dan memberikan tanda penerimaannya.

Sehingga perikatan yang menimbulkan perjanjian jaminan fidusia mempunyai sifat/karakteristik sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Hubungan perikatan berdasarkan mana kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan secara *constitutum possessorium* dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya ;
- b. Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang secara *constitutum possessorium* kepada kreditur;
- c. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *accessoir*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya sedangkan pokoknya ialah hutang piutang ;
- d. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus ;

---

<sup>29</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984, hal. 32-33.

- e. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia ;
- f. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh karena itu ia disebut juga perjanjian tidak bernama *innominat* atau *onbenoemde overeenkomst* ;
- g. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.

## **B. Obyek Jaminan Fidusia**

Sebelum berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 tersebut benda yang menjadi obyek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda *inventory*, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Namun sejak berlakunya UU No. 42 Tahun 1999, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi obyek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia, *Op.cit*, hal. 3.

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*account receivebles*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 10 UUF disebutkan, bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

### **C. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia**

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUF dinyatakan: Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUF No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUF, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia :<sup>31</sup>

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia yang memuat;
  1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan ;
  2. Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia ;
  3. Data perjanjian pokok ;
  4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ;
  5. Nilai penjaminan dan ;
  6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.

---

<sup>31</sup> PP No.86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

- b. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertipikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
- c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertipikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertipikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk ditertibkan sertipikat perbaikan. Sertipikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertipikat semula.

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertipikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum<sup>32</sup>.

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertipikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertipikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa

---

<sup>32</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit*, hal. 41



disebut irah-irah, **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUF.

#### **D. Hapusnya Jaminan Fidusia**

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, Pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus.

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, Yaitu :<sup>33</sup>

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau ;
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, yaitu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan.

Apabila jaminan fidusia hapus penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UUF dengan melampirkan pernyataan mengenai

---

<sup>33</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hal.318.

hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi<sup>34</sup>.

#### **E. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dengan Sertipikat Jaminan Fidusia bagi kreditur selaku penerima fidusia akan mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, pelaksanaan titel eksekutorial dari sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) UUF dapat dilakukan dengan cara :<sup>35</sup>

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia ;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;
- c. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

---

<sup>34</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hal.318.

<sup>35</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit*, hal. 46

Sedangkan dalam ruang lingkup pengadilan di Indonesia eksekusi ada 2 (dua) bentuk, yakni :<sup>36</sup>

- a. Eksekusi riil adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang :
  - 1) telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
  - 2) bersifat dijalankan terlebih dahulu ;
  - 3) berbentuk provisi dan ;
  - 4) berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.
- b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas bentuk akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap berupa :
  - 1) Grose akta pengakuan utang ;
  - 2) Grose akta hipotik ;
  - 3) Grose akta *credit verband*

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkannya pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

---

<sup>36</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya sitanggang, Grose Akta dalam pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.119-120.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, batal demi hukum.

Dalam hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

## **F. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Kepailitan dikenal oleh sebagian besar sistem hukum sebagai bagian dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum perusahaan. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan aktivanya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar hutang-hutangnya<sup>37</sup>

Pengertian Kepailitan dapat dilihat pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Kepailitan, yaitu sebagai berikut :

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pembersannya dilakukan oleh Kurator dibawah

---

<sup>37</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit 1998, dalam Teori dan Praktek, Cet. II, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal 8.

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur oleh undang-undang ini<sup>38</sup>.

Selain pengertian yang diberikan oleh undang-undang pengertian kepailitan dapat pula diambil dari beberapa pendapat yang diberikan oleh beberapa ahli hukum, menurut Munir Fuady, Pailit atau bangkrut adalah suatu sita umum atas seluruh harta Debitur agar dicapainya perdamaian antara Debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur<sup>39</sup>. Kartini Muljadi mengemukakan bahwa kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dan untuk menghentikan sitaan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan Debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur, sesuai dengan hak masing-masing<sup>40</sup>. Oleh Karena itu, dapat dikatakan pailit merupakan suatu keadaan yang menimpa seorang Debitur sebagai akibat ketidakmampuannya melunasi kewajiban pembayaran utangnya kepada para krediturnya.

Kepailitan pada intinya merupakan sita umum berdasarkan undang-undang atas harta kekayaan debitur. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari kepailitan adalah :<sup>41</sup>

- a. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “ semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan

---

<sup>38</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, *op.cit.* Pasal 1 butir 1.

<sup>39</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 1.

<sup>40</sup> Kartini Muljadi, *loc.cit*

<sup>41</sup> Sutan Remy Syahdeini, *op. cit.*, hal 38.

debitur”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur, asas tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata.

- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya masing-masing kreditur tersebut.) Asas tersebut dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.
- c. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan pailit maka debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahkan harta kekayaannya yang status hukumnya sudah berubah menjadi harta pailit.
- d. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya dengan cara pembebasan utang.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kepailitan merupakan kondisi yang dihadapi debitur, berupa penyitaan umum atas seluruh harta kekayaannya sebagai akibat dari ketidakmampuan melunasi kewajiban pembayaran utangnya, untuk dibagi-bagikan secara proporsional kepada para krediturnya.

## **2. Pihak-pihak yang terlibat dalam Kepailitan.**

Kepailitan sebagai salah satu upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang melibatkan beberapa pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan tersebut bisa timbul karena undang-undang, maupun karena keterlibatan pihak yang merasa berkepentingan atas proses kepailitan. Undang-undang telah mengatur pihak-pihak yang terkait dalam proses kepailitan, yaitu kreditur pemohon pailit, Debitur Pemohon atau termohon Pailit, kurator, Hakim Pengawas dan Majelis Hakim (Pengadilan) yang memutus perkara yang terkait dengan proses kepailitan. Pihak-pihak yang lain dapat terlibat dalam proses kepailitan termasuk menghadiri rapat-rapat Kreditur, Appraisal (penilai jaminan) dan Notaris jika diperlukan.

## **3. Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan**

Syarat-syarat untuk dapat diajukan pailit dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut :

Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari krediturnya<sup>42</sup>.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan pailit terhadap seseorang Debitur, dapat diajukan baik oleh Debitur sendiri ataupun salah satu Kreditur<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, *op.cit.* Pasal 2 ayat (1)

<sup>43</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kepastian Hukum terhadap lembaga Fidusia sebagai upaya pengamana Kredit*, Jakarta, 11 Juli 1994

- a. Debitur yang diajukan permohonan pailit tersebut harus paling sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain harus mempunyai lebih dari satu kreditur.
- b. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu Krediturnya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat pengajuan kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan tersebut nampaknya sangat mudah, Kreditur yang mengajukan kepailitan cukup membuktikan bahwa Debitur mempunyai kewajiban hutang terhadap Kreditur lain disamping dirinya sendiri dan terdapat utang pada pemohon pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak dibayar oleh Debitur.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur dalam ayat ini adalah baik Kreditur Konkuren, Kreditur Separatis maupun Kreditur Preferen. Khusus mengenai Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dimaksud telah memberikan kepastian mengenai kreditur mana yang dapat mengajukan permohonan pailit. Dalam peraturan perundang-undang kepailitan sebelumnya, hal tersebut tidak diatur secara jelas sehingga banyak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam.



Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang , maupun karena putusan Pengadilan, Arbiter atau Majelis Arbitrase.

Pengertian hutang ini pernah menjadi pemasalahan karena adanya perbedaan penafsiran atas pengertian menurut Undang-undang kepailitan sebelumnya. Namun demikian, masalah perbedaan penafsiran tersebut telah diperbaiki dalam Undang-undang kepailitan yang baru, dan berdasarkan penjelasan 2 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut, maka kontroversi atau penafsiran mengenai pengertian hutang semestinya sudah tidak perlu terjadi lagi. Pengertian utang yang diambil undang-undang kepailitan yang baru dengan demikian mengambil pengertian dalam arti luas.

#### **4. Prosedur Pengajuan Pemohonan Pailit.**

Proses Kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap debitur yang diajukan oleh satu atau lebih krediturnya ke Pengadilan yang selanjutnya mengeluarkan putusan yang menyatakan debitur tersebut dalam keadaan pailit. Pengadilan yang berwenang untuk memproses, memeriksa dan mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga, yaitu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 306 Undang-undang Kepailitan, Pengadilan Niaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 281 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1008

tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dinyatakan tetap berwenang dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden (keppres) Republik Indonesia Nomor 97 tahun 1999, Pemerintah telah membentuk Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Pembagian daerah hukum Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 2 jo, Pasal 5 Keppres No. 97 tahun 1999 adalah :

- a. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi :
  - 1) Sulawesi Selatan
  - 2) Sulawesi Tenggara
  - 3) Sulawesi Tengah
  - 4) Sulawesi Utara
  - 5) Maluku
  - 6) Irian Jaya
- b. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi :
  - 1) Sumatera Utara
  - 2) Riau
  - 3) Sumatera Barat
  - 4) Bengkulu
  - 5) Jambi
  - 6) Daerah Istimewa Aceh

- c. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi :
- 1) Jawa Timur
  - 2) Kalimantan Selatan
  - 3) Kalimantan Tengah
  - 4) Kalimantan Timur
  - 5) Bali
  - 6) Nusa Tenggara Barat
  - 7) Nusa Tenggara Timur
- d. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi :
- 1) Jawa Tengah
  - 2) Daerah Istimewa Yogyakarta
- e. Pengadilan Naiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi :
- 1) Daerah khusus Ibukota Jakarta
  - 2) Jawa Barat
  - 3) Sumatera Selatan
  - 4) Lampung
  - 5) Kalimantan Barat

Pengajuan permohonan pailit harus diajukan oleh seorang Advokat<sup>44</sup>.

Jangka waktu proses pemeriksaan perkara kepailitan, adalah 60 (enam puluh) hari, dimana putusan pengadilan harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari

---

<sup>44</sup> Undang-undang No. 37 Tahun 2004, *op.cit.*, Pasal 7

setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Proses tersebut lebih lama dibandingkan ketentuan sebelumnya yang hanya memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari,. Dengan adanya perpanjangan tersebut, diharapkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga akan lebih berkualitas karena tidak ada alasan bahwa putusan diambil karena terburu-buru.

Adanya batasan jangka waktu dalam proses pemeriksaan memberikan kepastian bagi para pihak menyangkut waktu yang dibutuhkan dan estimasi biaya-biaya termasuk biaya pengacara dalam rangka permohonan kepailitan ini. Pembatasan itu juga dapat mempersempit atau memperkecil kemungkinan rusaknya asset atau dilarikan oleh debitur.

#### **5. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit**

Pasal 2 Undang-undang Kepailitan juga mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, yaitu :

- a. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- b. Bank Indonesia, dalam hal debitur adalah Bank;
- c. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debitur adalah Perusahaan efek, Bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- d. Menteri Keuangan, dalam hal debitur adalah perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Dibandingkan dengan Undang-undang Kepailitan sebelumnya terdapat penambahan pihak yang dapat mengajukan pailit, yaitu Menteri Keuangan dalam

hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diberikan kepada Menteri Keuangan dimaksudkan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Adanya ketentuan yang berbeda dari ketentuan sebelumnya, menurut hemat penulis tidak lepas dari kontroversi permasalahan kepailitan yang menimpa beberapa perusahaan asuransi di Indonesia. Putusan pailit yang dijatuhkan kepada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dan Perusahaan Asuransi Prudential life, telah menimbulkan banyak tanggapan berbagai pihak termasuk tanggapan dari pihak asing sebagai pemilik modal yang merasa berkepentingan atas kepailitan tersebut.

## **6. Akibat Kepailitan**

Kepailitan pada intinya berarti suatu sitaan secara memyeluruh (*algemeen beslag*) atas segala harta benda daripada si pailit. Dengan pernyataan pailit menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut :

### **a. Akibat Kepailitan bagi Debitur.**

Kepailitan mengakibatkan debitur pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan harta kekayaannya yang termasuk harta pailit. Segala

perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali menguntungkan harta pailit.

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum ( *volkomen handelingbevoegd* ) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Debitur tidaklah berada dibawah pengampuan<sup>45</sup>. Dengan demikian debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum lainnya yang menyangkut dirinya seperti menikah, menerima hibah, atau bertindak sebagai kuasa.

Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan<sup>46</sup>. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah *actio pauliana*<sup>47</sup>.

#### **b. Akibat Kepailitan bagi Kreditur.**

Kepailitan mempunyai peranan untuk menyelesaikan bermacam-macam tagihan yang diajukan oleh kreditur-kreditur kepada debiturnya yang masing-masing mempunyai karakter, nilai dan kepentingan yang berbeda-beda. Proses dalam kepailitan dapat mengatur perbedaan-perbedaan tersebut melalui mekanisme pengolektifan penagihan piutang sehingga masing-masing kreditur tidak secara sendiri-sendiri menyelesaikan tagihannya.

---

<sup>45</sup> Remy Sjhadeini, *op.cit.*, hal 256

<sup>46</sup> Undang-undang No.37 Tahun 2004, *op.cit.*, Pasal 41 ayat (1)

<sup>47</sup> Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal 298

Dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka semua harta pailit diurus dan dikuasai oleh kurator untuk kepentingan semua para kreditur dengan diawasi pelaksanaannya oleh Hakim Pengawas. Semua tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator<sup>48</sup>.

Semua tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk mendapat pelunasan suatu perikatan dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitur<sup>49</sup>.

Kondisi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan tersebut mempunyai segi positif bagi para kreditur sehingga masing-masing pihak akan memperoleh haknya secara adil sesuai proporsinya.

Adanya prosedur Kepailitan memberikan keuntungan bagi kreditur yang tidak sanggup atau tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penagihan atas utang-utang debitur. Namun demikian, bagi sementara pihak terutama kreditur konkuren kepailitan tersebut dapat memberikan dampak yang tidak menguntungkan. Kreditur yang telah berupaya melakukan penagihan melalui proses gugatan di Pengadilan Negeri dan telah mengorbankan banyak waktu dan tenaga, dengan tiba-tiba harus dihentikan dengan adanya kepailitan. Kreditur konkuren yang mempunyai tagihan besar, mempunyai kekhawatiran piutangnya tidak akan kembali karena asset debitur yang kemungkinan saat itu lebih kecil dibandingkan hutangnya, sementara kreditur tersebut masih harus mengalah pada kreditur pemegang jaminan dan kreditur istimewa lainnya.

---

<sup>48</sup> Undang-undang No. 37 Tahun 2004, *op.cit.*, Pasal 26

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 29.

### **c. Akibat Kepailitan bagi Pemegang Hak Jaminan**

Kepailitan mempunyai akibat bagi seluruh kreditur, tidak terkecuali bagi kreditur bagi pemegang hak jaminan berupa gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Sebagai kreditur yang dijamin dengan hak jaminan, kreditur pemegang hak jaminan tersebut tentunya tetap berharap bahwa jaminan yang diterimanya dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur. Kreditur Separatis tersebut sangat berkepentingan agar hak-haknya yang timbul dari pengikatan jaminan yang diserahkan debitur kepadanya, tetap dapat dipergunakan meskipun debitur telah dinyatakan pailit.

Permasalahan bagi kreditur separatis akan timbul apabila nilai jaminan setelah dilaksanakan eksekusi atas jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban debitur pailit kepadanya. Dalam keadaan seperti itu, memang undang-undang telah mengatur bahwa kreditur separatis tersebut dapat mendaftarkan piutangnya kepada kurator. Pendaftaran piutang ini tidak lagi memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur tersebut. Kedudukannya telah berubah menjadi kreditur konkuren dengan segala konsekuensinya<sup>50</sup>.

Kreditur pemegang hak jaminan juga mempunyai kepentingan agar pelaksanaan hak jaminan dapat diperoleh secara cepat yaitu dalam waktu sesingkat mungkin.

---

<sup>50</sup> Ibid., Pasal 138.



Semakin cepat jaminan tersebut dicairkan atau dieksekusi, semakin baik atau semakin berpeluang bagi kreditur tersebut untuk memperoleh pengembalian piutangnya dari debitur secara optimal.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Kepailitan No. 37 No. 2004, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Kepailitan No. 37 No. 2004, hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud diatas, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90, (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

## **7. Berakhirnya Kepailitan**

Kepailitan tidak bersifat permanen, sebagaimana subyek hukum lainnya kepailitan dapat berakhir atau diakhiri.

Kepailitan dapat berakhir karena :

- a. Pembatalan Kepailitan oleh Pengadilan setelah adanya upaya hukum.
- b. Pencabutan Kepailitan
- c. Perdamaian
- d. Pemberesan

Kepailitan berakhir apabila putusan pernyataan pailit dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Terhadap putusan pailit yang diajukan terhadap debitur, debitur terpailit dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan selanjutnya Peninjauan kembali. Pembatalan kepailitan ini tidak mempengaruhi perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada

tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan pailit sehingga perbuatan tersebut tetap sah dan mengikat debitur terpailit.

Selain melalui upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, kepailitan juga dapat diakhiri dengan cara pencabutan kepailitan oleh pengadilan Niaga atas dasar rekomendasi dari kurator atau Hakim Pengawas. Pencabutan Kepailitan tersebut dilakukan apabila kondisi kekayaan atau usaha debitur tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya kepailitan. Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar Panitia Kreditur sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (1)

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **I. Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktek dalam hal Debitur Pailit, berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004.**

Apabila debitur Pemberi Fidusia mengalami kepailitan, maka menurut teori hukum jaminan tersebut, benda jaminan fidusia berada di luar boedel pailit. Berdasarkan Pasal 27 ayat ( 3 ) Undang-undang Fidusia menentukan bahwa hak untuk didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Jaminan Fidusia adalah salah satu jaminan kebendaan, sehingga kreditur penerima jaminan fidusia juga termasuk dalam kreditur separatis. Dalam praktek perbankan, Bank sebagai kreditur penerima jaminan fidusia jika debiturnya pailit maka kedudukan Bank yang bersangkutan adalah menjadi kreditur separatis.

Di dalam praktek perkreditan perbankan, barang-barang persediaan dan barang-barang bergerak milik debitur yang memperoleh kredit dari bank hampir selalu dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia. Hak Jaminan Fidusia memberikan secara hukum hak kepemilikan kepada kreditur atas barang-barang yang dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia itu, tetapi penguasaan atas barang-barang itu ada pada debitur. Dengan demikian, bagi benda-benda yang dibebani dengan Hak jaminan berupa fidusia, kurator tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penjualan atas benda-benda tersebut. Bukankah benda-benda yang

dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia itu secara hukum adalah milik kreditur dan bukan milik debitur ?

Suatu hal yang sangat mengganggu kepastian hukum di dalam praktek apabila benda-benda obyek jaminan fidusia yang akan dieksekusi secara langsung berdasarkan *parate eksekusi* sudah berada dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian, setiap upaya untuk menarik benda-benda bergerak yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara-cara kekerasan jelas tidak dapat dilakukan walaupun di dalam perjanjian pokoknya sudah dicantumkan klausula yang bersifat antisipatif sebagai berikut : “Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur diberi hak untuk mengambil dengan paksa mobil yang dijaminakan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib”.

Bahkan mungkin disamping klausula itu untuk kepentingan pihak kreditur diberi kuasa untuk menarik kembali dan kuasa untuk menjual jaminan fidusia. Namun demikian, dalam hal obyek jaminan fidusia tetap tidak dapat melakukan tindakan untuk menarik obyek jaminan fidusia.

Demikian juga terdapat permasalahan dalam hal debitur dinyatakan pailit, tetapi obyek jaminan fidusia sudah tidak ada lagi pada debitur mengingat obyek jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang mudah berpindah tangan. Kreditur penerima jaminan fidusia sebagai kreditur separatis tidak dapat melaksanakan haknya, sehingga kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia dalam kepailitan hanya sebagai kreditur konkuren<sup>52</sup>. Hal ini dapat terlihat dalam penyelesaian utang terhadap debitur an. PT. Bernas Madu Sari (PT.BMS), dimana

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Duma Hutapea, SH (kurator), *op.cit*

PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI) sebagai kreditur telah menempuh upaya melalui proses kepailitan karena debitur (PT.BMS) tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi angsuran hutang sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian No. 03/PKPU/2002/PN. Niaga.Jkt Pusat jo. 011/Pailit/2002/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 15-08-2002. Dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2003, PT.BMS telah dintakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat. Tentang duduk perkaranya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2002 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2002 dibawah Nomor : 03/PKPU/2002/PN.NIAGA JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 juni 2002 PT. Bank CIC Internasional, Tbk., melalui Kuasa Hukumnya SOEPRAPTO, LUKAS BUDIONO & Parterns telah mendaftarkan Permohonan PAILIT terhadap BMS dan terdaftar dengan Nomor 11/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST :
2. Bahwa PEMOHON PKPU telah menerima surat pemberitahuan panggilan sidang perkara kepailitan No. 11/Pailit/2002/PN.Niaga/JKT.PST tertanggal 7 Juni 2002 untuk sidang pada tanggal 17 Juni 2002 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
3. Bahwa jumlah pemohon kepailitan yang diajukan PEMOHON adalah sebesar US\$ 1.975.651.01 (belum, diverivikasi) ;

4. Bahwa PEMOHON PKPU adalah suatu perusahaan PMDN yang bergerak di bidang refinery gula yaitu pegumpulan bahan mentah berupa raw sugar (gula mentah) dan diproses dipabrik refinery gula dan kemudian hasil produknya dijual di pasar dalam negri ;
5. Bahwa dilihat dari NILAI PEMOHON PKPU sebagaimana tercermin dalam laporan Keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 (bukti P – 1) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo Utomo & Co, dan Laporan Keuangan Perusahaan (internal) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 (bukti P – 2) sebagai berikut :
  - Total asset yang dimiliki BMS per 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp. 210.854.766.765 (dua ratus sepuluh milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
  - Total kewajiban BMS per 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp.525.772.369.966,- (lima ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
6. Bahwa walaupun berdasarkan laporan keuangan tersebut diatas, posisi keuangan PEMOHON PKPU menunjukan angka yang kurang menyakinkan namun apabila kita membandingkan dengan proses operasional pabrik sebagaimana diuraikan dibawah ini maka sebetulnya PEMOHON PKPU masih memiliki potensi yang cukup memadai untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada para kreditur.

A. Berdasarkan data operasional pabrik PEMOHON PKPU pada umumnya :

Kapasitas Normal dan pabrik PEMOHON PKPU adalah 150.000 (seratus lima puluh ribu) Ton pertahun (bukti P – 3) berupa raw sugar dengan taksiran harga pasar Rp. 3.000.000/Ton (bukti P – 4)

Dari jumlah tonage tersebut diatas dalam prosesnya akan dapat diperoleh refined sugar sejumlah 95% = 142.500 ton. (Bukti P – 5)

Berdasarkan standar operasional pabrik hasil penjualan dari 142.500 refined sugar dengan harga Rp. 3.000.000,- (taksiran kasar harga pasar per ton) = 427.500.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan standar operasional pabrik biaya proses pertahun adalah jumlah tonage refined sugar X harga per ton = 142.500 ton X Rp. 458.790 (bukti P - 6) = Rp.65.377.575.000,-

Berdasarkan standar operasional pabrik, biaya pembelian raw sugar adalah jumlah tonage dikalikan harga per ton

Harga taksiran kasar raw sugar per ton = US\$. 185,50 (bukti P – 7)

Misalnya kurs 1 Dollar = Rp. 8.600,- maka

Biaya pembelian 142.500 ton refined sugar adalah =  
Rp.227.330.250.000,-

Biaya proses per tahun + pembelian raw sugar =

Rp.65.337.575.000,- + Rp.227.330.350.000,- = Rp.292.707.825.000,-

Berdasarkan standar operasional pabrik, hasil penuaian refined sugar pertahun (NET)

Rp.427.500.000.000,- (minus) Rp.292.702.825.000,- = Rp.  
134.792.175.000,-

Dan dalam 10 tahun penghasilan penjualan (NET) PEMOHON PKPU  
adalah 10 X Rp.134.792.175.000,- = Rp. 1.347.921.750.000,-

B. Hutang jangka pendek dan panjang menurut laporan keuangan

Rp.135.171.020.740,- + Rp. 390.0555.349.226,- = Rp. 528.348.271.245,-

Dengan jumlah dana sebesar prediksi Rp.1.347.921.750.000,- maka setiap  
tahun bisa dialokasikan sebesar Rp.2.551.199.319,- dibulatkan  
Rp.2.551.200.000,-

Diperkirakan Rp.551.000.000,- dipakai untuk biaya-biaya lain dalam  
proses pembuatan refined sugar, maka dengan suatu rencana  
rekstrukturisasi selama 10 tahun diharapkan PEMOHON PKPU dapat  
membayar seluruh hutang-hutangnya. Maka dari itu PEMOHON PKPU  
memiliki potensi yang cukup memadai untuk menyelesaikan hutang-  
hutangnya kepada para kreditur, jika untuk dikabulkan PKPU

7. Bahwa pada saat ini PEMOHON PKPU sedang dalam tahap NEGOSIASI  
Proposal Restrukturisasi Awal dengan PEMOHON dimana TERMOHON  
telah mengadakan pembicaraan informal pada tanggal 20 Juni 2002 di  
Restoran Milenia, Jakarta antara Sdr.Hudiyanto Direktur Keuangan  
TERMOHON dan Sdr. Willy Edy Assistant Vice President PEMOHON;  
Begitu juga TERMOHON telah melakukan pembicaraan informal dengan  
Bank Negara Indonesia (Persero) sebagai kreditur Utama yang diadakan  
tanggal 20 Juni 2002 di Kantor Pusat BNI ;



8. Bahwa disamping PT.Bank CIC Internasional, Tbk, dan Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. PEMOHON PKPU masih mempunyai kreditur-kreditur lainnya, sebagaimana diperinci dalam pertelaan yang merupakan lampiran dari Permohonan ini sebagaimana diisyartkan oleh Pasal 93 Peraturan Kepailitan (bukti P – 9) ;
9. Bahwa PEMOHON PKPU masih melihat adanya kemungkinan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur, karena perusahaan masih dalam keadaan beroperasi apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya, berdasarkan butir 6 diatas ;
10. Bahwa saat ini PEMOHON PKPU memperkejakan karyawan sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) orang (vide bukti P – 9) karyawan, bila perusahaan dinyatakan pailit tidak menutup kemungkinan terjadinya gejolak sosial yang tidak diinginkan. Karena itu solusi PKPU akan lebih bermanfaat bagi para kreditur ;
11. Bahwa sehubungan dengan rencana Proposal Rekstruksturisasi sebagaimana telah diuraikan dalam butir 7 diatas, maka PEMOHON PKPU dan para kreditur memerlukan waktu unttuk dapat membahas lebih lanjut proposal Rekstrukturisasi Awal yang telah diajukan BMS kepada para krediturnya pada tanggal; 20 juni 2002 tersebut dan butir ke 6, sedangkan rencana perdamaian sebagaimana disyaratkan Pasal 213 ayat (20) Peraturan Kepailitan akan segera disusulkan ;
12. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan menunjuk Pasal 217 (6) dan Pasal 214 (2) dari Undang-undang Kepailitan No. 4 1998, mohon kepada Ketua

Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat agar berkenan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU PT.Bernas Madu Sari (PT.BMS) ;
2. Menetapkan Pemohon dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus PKPU PT. Bernas Madu Sari (PT.BMS) Sdri.Hj.Tutik Sri Suharti.

Tentang Hukumnya :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pemohon adalah agar kepada Pemohon diberi waktu yang cukup untuk mengupayakan pembayaran utang-utang kepada Kreditor Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon PKPU diajukan sebagai counter permohonan kepailitan, maka permohonan tersebut diperiksa pada saat yang bersamaan dengan permohonan kepailitan, oleh karena itu pula sesuai dengan ketentuan Pasal 217 ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Stbl. 1906 Nomor 348 jo. Stbl.1905 Nomor 217, maka permohonan kepailitan Nomor : 11/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 3 Juni 2002 ditangguhkan ;

Menimbang, bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah ditandatangani oleh Pemohon yang berwenang mewakili PT. BERNAS MADU SARI, sesuai dengan surat permohonan dan kuasa hukumnya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta telah melampirkan Neraca dari PT. BERNAS MADU SARI (bukti 1, 2 dan 8) yang memuat daftar aktiva dan pasiva serta daftar Para Kreditur dari PT. BERNAS MADU SARI, oleh karena itu pula permohonan PKPU telah memenuhi ketentuan Pasal 213 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Stbl. 1906 Nomor 348 jo. Stbl. 1905 Nomor 217 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU telah memenuhi persyaratan hukum, maka berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Stbl. 1906 Nomor : 348 jo. Stbl 1905 Nomor : 217, Pengadilan harus segera mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) untuk waktu paling lama 45 hari terhitung sejak putusan PKPUS diucapkan ;

Menimbang bahwa oleh karena PKPUS harus dikabulkan maka perlu ditunjuk dan diangkat Hakim Pengawas dan Pengurus ;

Menimbang, bahwa mengenai penunjukan dan pengangkatan Hakim Pengawas, maka akan dipilih dari antara Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU didalam permohonannya telah memohon agar Sdri. Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH, ditunjuk sebagai pengurus yang akan mengurus harta debitur secara bersama-sama dan sepanjang

pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menentukan adanya benturan kepentingan, maka permohonan Pemohon PKPU tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segera setelah ditetapkannya PKPUS, Pengadilan melalui Pengurus wajib memanggil Debitur dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat paling lambat pada hari ke-45, terhitung sejak PKPUS ini ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditentukan kemudian setelah pengurus nyata-nyata melaksanakan tugasnya yaitu setelah pengurus selesai melaksanakan tugas-tugasnya, dan besarnya akan ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.09.HT.05.10 Tahun 1998, tertanggal 22 September 1998 tentang Pedoman Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon PKPU ;

Memutuskan :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPUS) dari PT. BERNAS MADU SARI (BMS (Pemohon)) untuk sementara, yaitu selama 45 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
- Menunjuk Sdri PUTU SUPADMI, SH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
- Mengangkat Sdri.Hj.TUTIK SRI SUHARTI, SH, beralamat Jalan Garuda No. 71B, Kemayoran Jakarta Pusat sebagai Pengurus;

- Menetapkan Sidang Majelis Hakim pada Hari : Kamis, tanggal 15 Agustus 2002 jam 10.00 WIB di gedung Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat ;
- Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan Para Kreditur untuk datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut ;
- Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditentukan kemudian setelah Pengurus melaksanakan tugas-tugasnya ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Dari hasil pengumuman daftar kreditur sementara yang telah diumumkan oleh Kurator pada tanggal 3 April 2003 diketahui bahwa BNI adalah satu-satunya Kreditur Separatis (kreditur Penerima Jaminan Fidusia dan pemegang hak tanggungan) terhadap PT.BMS (dalam Pailit). Berkaitan dengan kedudukan BNI sebagai kreditur separatis tersebut, maka berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Kepailitan ditentukan bahwa hak eksekusi BNI selaku kreditur pemegang Hak preferen (Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit dikeluarkan. Terhadap penangguhan tersebut, berdasarkan Pasal 57 Ayat ( 2 ) Undang-undang Kepailitan No. 37 tahun 2004, BNI telah mengajukan permohonan kepada kurator agar penangguhan eksekusi tersebut diangkat (pengangkatan penangguhan eksekusi) dan BNI sebagai kreditur separatis menyatakan bahwa hak untuk mengeksekusi asset/barang jaminan tersebut

diserahkan sepenuhnya kepada Kurator, tanpa melepaskan hak preferen yang dimilikinya. Oleh karena pengangkatan penangguhan eksekusi tersebut tidak dapat segera dilaksanakan maka menyebabkan terjadinya penurunan nilai asset PT.BMS (dalam pailit). Hal ini tidak sesuai dengan maksud penangguhan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 56 Ayat ( 1 ) Undang-undang Kepailitan No. 37 tahun 2004.

Mengingat tidak seluruh hutang PT.BMS (dalam pailit) dapat dicover dengan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, maka berdasarkan Pasal 138 Undang-undang Kepailitan terhadap hutang yang tidak dicover diberikan hak sebagai kreditur konkuren, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan pembayaran atas piutang tersebut. Oleh karena obyek jaminan fidusia yang diserahkan ke BNI berupa stock gula (gula rafinasi) dan bahan baku pembuatan gula (Raw sugar) sudah tidak ada lagi sehingga terdapat sisa tagihan hak BNI sebagai Kreditur Separatis, maka sisa hak tagihan dimaksud ditambahkan ke dalam tagihan BNI sebagai kreditur konkuren. Diantara sesama para kreditur konkuren, mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur penerima jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara proposional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut (berbagi secara pari passu pro rata parte).

Dengan menurunnya nilai asset PT. BMS (dalam Pailit), khususnya yang diikat dengan fidusia, maka pada saat Kurator menjual asset dimaksud setelah

hasilnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada Pemegang Hak Tanggungan dan Pemegang Hak Istimewa (pajak), maka Penerima Jaminan Fidusia tidak memperoleh bagian. Dalam hal ini, BNI dalam kedudukan sebagai Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur Separatis) melepaskan hak separatisnya menjadi Kreditur Konkuren untuk mengajukan sisa tagihannya kepada Kurator<sup>53</sup>.

BNI sebagai Kreditur Separatis tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian pada saat Rapat kreditur mengingat BNI sebagai Penerima Jaminan Fidusia tidak melepaskan hak separatisnya pada saat sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. Namun karena dalam perkembangannya ternyata obyek jaminan fidusia sudah tidak ada lagi (menurunnya nilai asset), maka BNI mengambil sikap mengajukan tagihan sebagai kreditur konkuren, yang seharusnya apabila BNI telah melepaskan hak separatisnya pada saat itu (pada Rapat kreditur) sehingga menjadi kreditur konkuren dapat memberikan hak suaranya berkenaan dengan rencana perdamaian (pasal 149 Undang-undang Kepailitan). Oleh karena itu, kedudukan BNI sebagai kreditur separatis, yaitu penerima jaminan fidusia telah dirugikan.

Pada dasarnya fidusia adalah lembaga jaminan yang mempunyai fungsi sudah tidak ada lagi pada debitur pemberi fidusia, maka kreditur selaku penerima jaminan fidusia tetap mempunyai kedudukan yang lebih didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya. Mengingat resiko yang dihadapi Bank dalam menerima obyek jaminan fidusia, maka dalam prakteknya Bank dalam memberikan kredit kepada debitur, khususnya dalam hal pemberian Kredit Modal Kerja (KMK)

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Yuris BNI di Jakarta, *loc.cit.*

selain mesyaratkan pengikatan jaminan fidusia sebagai jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibiayai (stock, mesin-mesin yang tidak ditanam dalam tanah), juga jaminan tambahan antara lain berupa tanah, bangunan maupun mesin-mesin yang ditanam, dalam tanah yang diikat dengan hak tanggungan.

Perdamaian merupakan salah satu mekanisme dalam proses kepailitan dan merupakan salah satu cara untuk mengakhiri kepailitan. Dalam proses kepailitan, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur yang disahkan oleh Pengadilan Niaga (homologasi) yang berisi mekanisme pembayaran seluruh atau sebagian utang debitur. Perdamaian pada pokoknya adalah suatu perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditur konkuren yang memuat kesepakatan tentang cara bagaimana para kreditur dapat memperoleh pembayaran piutang mereka dengan cara yang disetujui para kreditur.

Dalam Undang-undang kepailitan, perdamaian diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, dalam hal perdamaian tersebut dapat diterima oleh kreditur dan pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir dan kurator harus mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan Hakim Pengawas.

Salah satu maksud dari proses kepailitan adalah adanya pemberesan harta pailit atau likuidasi atas seluruh asset debitur terpailit untuk dibagikan secara adil sesuai dengan haknya kepada seluruh kreditur-krediturnya.



Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Setelah harta pailit dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat kreditur untuk mendengar seperlunya dari para kreditur mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan namun belum juga dicocokkan. Segera setelah kepada kreditur yang dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan dan kurator harus mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian yang ditetapkan Hakim Pengawas.

Dengan berakhirnya kepailitan tidak mengakibatkan kreditur yang belum memperoleh piutangnya tidak dapat menagih piutangnya. Kreditur yang belum memperoleh pembayaran secara penuh atas tagihannya dapat mengajukan kembali tagihannya pada saat debitur pailit tidak lagi dalam keadaan pailit. Kreditur yang piutangnya tidak dibayar oleh debitur setelah berakhirnya kepailitan dapat mengajukan permohonan kepailitan kembali kepada debitur.

Dalam hal kepailitan berakhir karena perdamaian, debitur berkewajiban untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai dalam perdamaian. Jika debitur tidak melaksanakan isi perdamaian, maka berdasarkan pasal 170 Undang-undang Kepailitan mengatur bahwa pembatalan perdamaian akan mengakibatkan

suatu putusan untuk membuka kembali proses kepailitan. Dengan kata lain, apabila pembatalan perdamaian dikabulkan, debitur tersebut akan kembali dalam keadaan pailit.

Setelah berakhirnya kepailitan maka debitur terpailit atau para ahli warisnya berhak untuk memasukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang dulu memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Permohonan rehabilitasi tersebut harus melampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditur yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Permohonan rehabilitasi tersebut harus diumumkan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak ada keberatan, maka pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Terhadap putusan Pengadilan atas permohonan rehabilitasi tidak terbuka upaya hukum apapun.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam bahwa kebenaran yang pernah di tangani di Balai Harta Peninggalan Jakarta berkaitan dengan Penelitian ini, untuk masalah Kedudukan Kreditur selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam hal Debitur Pailit belum pernah dialami, meskipun dalam keterangannya dikatakan bahwa masalah ini pernah ada sebelumnya.

Dikatakan selanjutnya, bahwa dalam praktek Jaminan Fidusia didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta, barangnya nampak apa yang dijamin ada, jadi Kedudukan Kreditur selaku penerima Jaminan fidusia hampir sama dengan Kreditur Separatis, karena kreditur tersebut mempunyai surat

menyurat atau bukti segala macam. Disini ada perbedaan antara Kreditur Separatis/ kreditur Preferen yaitu menguasai barang, sedangkan jaminan fidusia tidak menguasai barang.

Jadi untuk menentukan apa itu Kreditur Preferen, Kreditur konkuren, Kreditur Separatis itu wewenang setelah diadakan rapat verivikasi. Dalam rapat Verivikasi akan disebutkan tentang apa buktinya dan dikategorikan kreditur apa? Apakah masuk kreditur Separatis atau kreditur preferen. Berkaitan dengan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam preaktek dalam hal Debitur Pailit, menurut Pasal 56 Undang-undang Kepailitan, dilihat dari pandangan Balai Harta Peninggalan, Beliau mengatakan bahwa Balai Harta Peninggalan dengan kasus ini harus mengikuti sesuai dengan Peraturan dan tidak bisa mengeksekusi langsung, atau sebelum Pailit diketahui. Bisa dilihat dalam Pasal 48 Undang-undang Kepailitan tentang Hak tuntutan kembali menjadi harta Pailit, tetapi ini sangat jarang sekali<sup>54</sup>.

Jadi ditinjau dari Balai Harta Peninggalan atau Kurator Swasta sulit mengikuti perkembangan, itu hanya dikatakan sebagai Kreditur Preferen atau sebagai Kreditur konkuren. Jadi wewenang dari Hakim Pengawas dalam Rapat Verivikasi ditentukan kreditur apa? Secara tegas harus ditentukan kedudukan kreditur setelah Rapat Verivikasi, cuma utang Piutang biasa tanpa jaminan, berarti konkuren bersaing.

Apabila debitur atau pemberi fidusia pailit atau cideara janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Balai Harta Peninggalan, Bpk. Mukhlis Adlin, SH, *loc.cit*

- a. Pelaksanaan titel eksekusi eskekutorial oleh penerima fidusia tanpa melalui Pengadilan.
- b. Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia apabila dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dengan syarat :
  1. Pelaksanaan Penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara terbuka oleh pemberi atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  2. Diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar.

Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagaimana hak tanggungan yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999<sup>55</sup>. Sertipikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*in krach van gewijsde*). Berdasarkan titel eksekutorial tersebut, penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melauai pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui Pengadilan (*Parate ekskusi*). Apabila *Parate Eksekusi* melalui pelelangan umum tidak menguntungkan, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan ada kesepakatan anatar pemberi dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan terpenuhi. Pelaksanaan penjualan dengan cara dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu)

---

<sup>55</sup> Makalah disampaikan pada seminar nasional mengenai Pelaksanaan Pembebanan Fidusia menurut UU No. 42/1999. (1 Desember 1999), hal 3.

bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai jaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi pelunasan utang, maka debitur bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Berdasarkan penelitian diatas baik melalui data-data dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 56 Undang-undang Kepailitan, setiap kreditur yang memegang Hak Tanggungan, Hak Gadai atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan ketentuan ini berarti seorang kreditur pemegang hak jaminan (hipotik, hak tanggungan, hak gadai, fidusia) tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit. Ketentuan Pasal 56 adalah sejalan dengan ketentuan mengenai dan dengan demikian mengakui, hak separatis dari pemegang hak jaminan sebagaimana ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pencatuman ketentuan Pasal 56 ini sangat penting bagi kepentingan dan pemberian perlindungan kepada kreditur.

Penjelasan dari Pasal 56 Undang-undang Kepailitan mengemukakan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) bertujuan antara lain :

- Untuk memperbesar keuntungan tercapai perdamaian ; atau
- Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit ; atau
- Untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Ketentuan hukum yang menentukan terjadinya keadaan yang disebut *standstill* atau *automatic stay*, yaitu keadaan *status quo* bagi debitur dan para kreditur. Biasanya diberikan oleh undang-undang bukan setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan, tetapi justru selama berlangsungnya pemeriksaan pailit oleh Pengadilan atau diberikan selama dilakukan negosiasi antara debitur dan para kreditur dalam rangka restrukturisasi utang. Setelah debitur dinyatakan Pailit yang terjadi hanyalah likuidasi terhadap harta pailit.

## **II. Hak Kreditur Separatis selaku Penerima Jaminan Fidusia dalam pemeberesan harta Pailit Debitur apabila ternyata obyek Jaminan Fidusia sudah tidak ada lagi pada debitur pailit.**

Undang-undang telah mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *second way out* bagi pemberian utang oleh kreditur kepada debitur. Ketentuan mengenai *second way out* itu diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tak bergerak), baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Dengan kata lain. Pasal 1131 KUH Perdata itu memberikan ketentuan bahwa apabila debitur cidera janji tidak melunasi utang yang diperolehnya dari para krediturnya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya itu.

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi seorang kreditur, seandainya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata itu tidak ada, maka sulit dapat membayangkan ada kreditur yang bersedia memberikan utang kepada debitur. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut sudah merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat pada sistem hukum setiap negara. Bagaimana hasil penjualan harta kekayaan debitur itu dibagikan diantara para kreditur apabila debitur cidera janji tidak melunasi utangnya? Jawaban mengenai pertanyaan tersebut dalam KUH Perdata dijumpai dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi utang kepada debitur. Artinya, apabila debitur cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proporsional (secara *pari passu*) menurut besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain.

Sekalipun Undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada para kreditur ditentukan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut, tetapi perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon kreditur untuk memberikan utang kepada calon debitur. Tentulah akan lebih menarik bagi calon Kreditur apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik daripada sekedar perlindungan berupa memperoleh pelunasan secara proporsional dari hasil penjualan harta debitur.

Adakah perlindungan seperti itu dalam sistem hukum kita? sistem hukum kita ternyata mengenai pemberian perlindungan yang istimewa seperti itu bagi kreditur-kreditur. Perlindungan istimewa itu hanya dapat diberikan apabila dipenuhi ketentuan-ketentuan tertentu dan ditempuh proses tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang.

Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila kreditur tersebut memegang hak jaminan atas benda-benda tertentu milik debitur. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan istimewa tersebut telah disyaratkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata yang telah dikemukakan diatas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditur dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain.

Bagaimana caranya seorang Kreditur dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata itu? Jawaban mengenai pertanyaan itu diberikan oleh Pasal 1133 KUH Perdata. Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, hak untuk didahulukan diantara para kreditur timbul dari :

- a. Hak Istimewa
- b. Gadai
- c. Hipotik

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatan kreditur tersebut lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata sifat piutang kreditur tersebut.



Kedudukan Hak Jaminan terhadap hak istimewa, menurut Pasal 1134 Ayat (2) KUH Perdata lebih tinggi daripada Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya. Hak istimewa yang lebih tinggi dari hak jaminan misalnya biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang baik suatu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari hasil penjualan benda tersebut sebelum dibayarkan kepada para kreditur lainnya, termasuk kepada kreditur pemegang hak jaminan.

Dari keterangan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa ada 2 jenis kreditur. Jenis yang pertama adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Kreditur yang demikian itu disebut Kreditur Preferen. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk Kreditur yang demikian itu ialah *Secured Creditor*.

Jenis Kreditur yang kedua, ialah kreditur yang harus berbagi diantara mereka secara proporsional, atau disebut juga secara *pari passu*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing piutang mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Kreditur jenis yang kedua tersebut disebut kreditur konkuren. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk kreditur jenis yang kedua ialah *Unsecured Creditor*.

Pengertian Kreditur dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau

undang-undang yang pelunasannya dapat diatgih di muka Pengadilan. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat ( 1 ) Undang-undang Kepailitan menentukan :

Yang dimaksud dengan kreditur adalah baik Kreditur konkuren, Kreditur Separatis maupun Kreditur Preferen, khusus mengenai kreditur Separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan<sup>56</sup>.

Dalam Pasal 1 Butir 8 Undang-undang Fidusia menentukan bahwa

“Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang”.<sup>57</sup> Dalam pelunasan utang tersebut, tidak tertutup kemungkinan bagi kreditur tertentu diutamakan pelunasannya dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Kreditur yang haknya didahulukan disebut sebagai Kreditur Preferen, sedangkan kreditur yang tidak diutamakan disebut kreditur konkuren<sup>58</sup>. Kedudukan sebagai kreditur preferen tentu lebih disukai pihak kreditur dibandingkan haknya menjadi kreditur konkuren. Sehubungan dengan itu, pihak kreditur biasanya akan meminta penyerahan kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pembayaran kembali utangnya.

Kreditur yang mempunyai kedudukan preferen, dalam hal debitur dinyatakan pailit biasa disebut sebagai kreditur Separatis. Kreditur Separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan) seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lain<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> Ibid., Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)

<sup>57</sup> Ibid., Pasal 1 Butir 8 Undang-undang Fidusia

<sup>58</sup> R. Subekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut hukum Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 11 - 12

<sup>59</sup> Munir Fuady, *loc. cit*

Istilah Kreditur Separatis tersebut muncul karena kreditur yang memiliki hak jaminan tersebut dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap jaminan diluar proses kepailitan.

Pengertian Separatis yang berarti “terpisah dikarenakan kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya dalam arti kreditur tersebut dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari penjualan jaminannya yang terpisah dari harta pailit pada umumnya. *Sudargo Gautama*<sup>60</sup> dan *R.Subekti*<sup>61</sup> menyebut kreditur separatis dengan istilah separatisten, yakni kreditur dengan hak tanggungan, hak gadai, hak agunan atau kebendaan lainnya. Kreditur Separatis dapat dibedakan jenisnya berdasarkan jenis pengikatan jaminan yang diberikan debitur selaku pemberi hak jaminan dengan kreditur selaku penerima hak jaminan. Hak jaminan sebagai hak yang didahulukan mempunyai beberapa bentuk yang masing-masing mempunyai karakter dan peruntukan masing-masing. Bentuk-bentuk pengikatan tersebut adalah Hipotik, Hak Tanggungan, Gadai dan Fidusia.

Bank sebagai kreditur Penerima jaminan Fidusia jika debiturnya pailit, maka kedudukan Bank yang bersangkutan adalah menjadi kreditur separatis. Dalam Akta Jaminan Fidusia tidak dicantumkan mengenai kedudukan separatis dari Bank sebagai penegasan dari hak kreditur penerima Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, Hak tanggungan, atau hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian Pasal 55 Undang-undang Kepailitan tersebut

---

<sup>60</sup> Sudargo Gautama, *Komnetar Atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia (1998)*, Cet.I, (bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hal . 75.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Hal. 233.

seolah-olah menyatakan bahwa kreditur separatis tidak terpengaruh dengan adanya putusan pernyataan pailit. Namun, Pasal 56 Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1), ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Alasan pembentuk Undang-undang menetapkan adanya tangguh waktu tersebut adalah untuk memberikan perlindungan ekonomis terhadap hak kurator menjual barang jaminan dalam kepailitan.

Selama jangka waktu penangguhan tersebut, kurator berdasarkan Pasal 56 Ayat (3) Undang-undang Kepailitan dapat menggunakan harta pailit berupa benda bergerak atau menjual benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur. Jangka waktu penangguhan tersebut berakhir demi hukum saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi (keadaan tidak mampu bayar). Keadaan insolvensi itu tidak perlu ditetapkan dengan putusan hakim. Keadaan insolvensi itu datang dengan sendirinya bilamana :

- a. Tidak ada akor ;
- b. Ada akor, tetapi tidak disetujui oleh rapat verifikasi
- c. Ada akor yang disetujui oleh rapat verifikasi tetap tidak mendapat homologasi dari hakim pemutus kepailitan;
- d. Ada akor yang sudah dihomologasi tetapi ditolak oleh Hakim Banding<sup>62</sup>.

---

<sup>62</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasutan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, jilid 8, (jakarta : djambatan, 1998), hal. 49.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana apabila pada saat proses verifikasi berjalan lama, ternyata benda jaminan fidusia tidak ada lagi (stock membusuk). Apakah hak untuk melakukan eksekusi dari kreditur penerima jaminan fidusia atau kreditur separatis tetap dilaksanakan?

Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan, kreditur penerima jaminan, harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1). Dalam Pasal 178 Ayat (1) menyebutkan bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Sebagian kurator berpendapat bahwa penangguhan hak kreditur separatis secara tegas diatur dalam Undang-undang Kepailitan, yaitu Pasal 56 Ayat (1), maksimal 90 (sembilan puluh) hari<sup>63</sup>.

Dengan demikian, sekalipun masa verifikasi atau pencocokan piutang memakan waktu lama dan masa insolvensi belum timbul, kreditur penerima jaminan fidusia atau kreditur separatis lainnya dapat mulai melaksanakan haknya. Namun demikian, dalam prakteknya ada kurator yang menerapkan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan bahwa hak eksekusi kreditur separatis dimulai masa insolvensi timbul<sup>64</sup>.

Pendapat pertama tentu akan lebih memberi kepastian dan jaminan hukum bagi kreditur separatis, sedangkan pendapat kedua yang mendasarkan pada Pasal 59

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Duma Hutapea, Sh (kurator) di Jakarta, tanggal 19 Oktober 2007

<sup>64</sup> Putusan MARI ditingkat kasasi dengan putusan No. 012/k/n/2003 tanggal 13 Juni 2003

Undang-undang Kepailitan tentunya makin memperlemah posisi kreditur separatis dalam proses kepailitan. Timbulnya pandangan bahwa hak eksekusi kreditur separatis atau berakhirnya masa penangguhan bagi kreditur separatis atau berakhirnya masa penangguhan bagi kreditur separatis baru timbul setelah masa insolvensi dapat terjadi dengan menunjuk Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan :

Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain :

- a. Untuk memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian;
- b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- c. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal;<sup>65</sup>

Pandangan seperti itu akan memberi arti bahwa hak-hak eksekusi kreditur separatis tidak cukup terlindungi dalam proses kepailitan. Adanya dua pandangan yang berbeda tentang kapan dimulainya hak eksekusi kreditur separatis tersebut tentunya perlu ada ketegasan dari pengadilan.

Dengan demikian lembaga jaminan harus dihormati oleh Undang-undang Kepailitan. Sebagaimana diketahui bahwa kreditur separatis (kreditur penerima hak jaminan) mempunyai kedudukan terpisah dengan kreditur lainnya.

Oleh karena itu, hak separatis yang diberikan oleh hukum kepada kreditur penerima hak jaminan bahwa barang jaminan yang dibebani dengan hak jaminan berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak kreditur penerima hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditur lainnya. Sehubungan dengan

---

<sup>65</sup> Undang-undang No. 37 Tahun 2004, op.cit., Penjelasan Pasal 57 Ayat (1)

berlakunya hak separatis tersebut, maka kreditur penerima jaminan hak Jaminan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan atas harta kekayaan debitur yang dibebani dengan hak jaminan itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Balai Harta Peninggalan di Jakarta bahwa Berkaitan dengan Hak Kreditur Separatis selaku Penerima Jaminan Fidusia apabila debitur pailit dengan kreditur lainnya menurut pandangan Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta, adalah bahwa Kreditur Separatis tersebut mempunyai hak istimewa. Itu bedanya preferen separatis dengan konkuren, jadi harus diistimewakan. Sekarang yang jadi pertanyaan misalnya utang debitur misalnya 5000 pemegang jaminan kreditur preferen bisa menjual dieksekusinya cuma 4000, yang jadi pertanyaan 1000 nya kemana? Jadilah kreditur konkuren, untuk kekurangannya dimasukan dalam kreditur konkuren. Konkuren itu namanya kreditur bersaing, jadi yang jadi pertanyaan misalnya kreditur atau tagihan kreditur konkuren itu keseluruhan 10.000, padahal harta si Pailit tinggal 5000, maka tidak terpenuhi, jadi apa yang diperoleh itulah berdasarkan presentasi.

Jadi tidak selamanya pailit itu bagus, apakah kepailitan merupakan solusi utang piutang? menurut pandangan Bapak Kepala BHP, bukan merupakan solusi, karena rata-rata kepailitan di Indonesia adalah Insolven ( lebih banyak utang dari pada harta kekayaan) belum pernah didapati kalau yang pailit mempunyai harta kekayaan lebih dari pada utangnya. Pailit bukan karena tidak mempunyai harta, karena ada utang atau biaya yang jatuh tempo, umumnya di Indonesia, utangnya lebih besar dari harta kekayaannya.

Ada kasus yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan di Jakarta baru-baru ini, dinyatakan pailit si A oleh kreditur, begitu dinyatakan pailit, rupanya harta kekayaan dari yang dinyatakan Pailit tidak mencukupi utangnya, akhirnya dibatalkan kembali Pailit itu, tidak atas permintaan debitur. Dia pikir harta kekayaan si pailit tadi melebihi utang kreditur nyatanya tidak, kreditur sendiri yang menuntut dan membatalkan, oleh sebab itu kreditur tersebut dikenai denda. Berkaitan dengan dana dari BHP mengenai kasus ini, itu berkenaan dengan penerimaan negara bukan pajak khusus untuk BHP ditentukan dengan peraturan pemerintah untuk pengutipan biaya pengelolaan kepailitan.

Ada kepailitan yang berakhir menurut Undang-undang dan ada Pailit yang berakhir dengan perdamaian, semuanya kena dana sesuai dengan peraturan pemerintah. berbeda dengan kurator swasta, kurator swasta juga memakai peraturan Menteri Hukum dan HAM, kalau kurator swasta masuk pendapatan sendiri bukan penerimaan negara bukan pajak. Inilah yang menjadi perbandingan kalahnya kurator pemerintah dengan kurator swasta.

Jadi di Balai Harta Peninggalan prakteknya begitu ada Pailit diumumkan dalam Surat Kabar, BHP memanggil kreditur untuk dibuat daftar kreditur sementara yang diakui. Balai Harta Peninggalan melihat Pemegang Jaminan akan dimasukkan ke preferen atau konkuren, dan hasilnya setelah rapat verifikasi, jadi bukan BHP yang menentukan kedudukan kreditur tersebut.

Misalnya kreditur dari Bank, dibuatlah suatu daftar kreditur yang diakui sementara sebagai preferen atau konkuren. Tetapi kalau sudah kreditur yang ditetapkan atau kreditur tetap itu hasilnya dari Rapat Verifikasi dengan harus



dihadiri oleh si Debitur atau si Pailit, karena debitur yang mengetahui utangnya, untuk berlangsungnya proses kepailitan, terkecuali dengan pertimbangan-pertimbangan, hartanya cukup untuk membayar kreditur dan debitur melarikan diri atau kreditur tidak mengajukan tagihan<sup>66</sup>.

Berdasarkan masalah tersebut maka dapat disimpulkan mengenai kedudukan hukum Hak Jaminan dalam Kepailitan, yang berlaku bagi hak jaminan sebagaimana dikemukakan dibawah ini :

1. Hak Jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan Hak Jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan Pailit oleh Pengadilan.
2. Kreditur pemegang Hak Jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas Hak Jaminannya. Artinya, kreditur pemegang Hak Jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan Undang-undang, benda yang dibebani dengan Hak Jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
3. Hak Jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang Hak Jaminan terhadap para kreditur lainnya.
4. Hak Jaminan merupakan hak aksesori terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya. apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian Hak Jaminan demi hukum berakhir pula.

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Balai Harta Peninggalan Bpk. Mukhlis Adlin, SH, pada tanggal 8 Oktober 2007.

5. Hak Jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, Hak Jaminan itu akan selalu melekat diatas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya. Sifat kebendaan dari hak Jaminan diatur dalam pasal 528 KUH Perdata.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hal tersebut apabila Debitur wanprestasi atau cidera janji atau Pailit, maka eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berdasarkan bunyi Pasal 29 UUF tersebut, yaitu “ Dalam hal debitur pemberi fidusia yang telah mempunyai / memegang sertipikat fidusia dapat atau berhak untuk menjual obyek jaminan fidusia dengan cara :
  - a. Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh Penerima Fidusia, yaitu dengan mohon eksekusi sertipikat jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
  - b. Penjualan atas kekuasaan Penerima Fidusia berdasarkan Parate Eksekusi.
  - c. Penjualan dibawah tangan obyek jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fisusia.
2. Dalam Pasal 56 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Lebih jauh lagi masa penangguhan tersebut tidak pasti karena berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan kreditur penerima hak jaminan harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Apabila rapat verifikasi beralut-larut dan masa insolvensi menjadi tertunda melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pailit diucapkan, maka hak kreditur separatis untuk bisa mulai melaksanakan eksekusinya menjadi ikut tertunda. Hal ini menimbulkan resiko bagi kreditur penerima jaminan fidusia mengingat barang yang dijaminkan berupa barang bergerak sudah tidak ada lagi pada debitur (penurunan nilai asset). Dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga, dalam hal obyek jaminan fidusia tidak ada lagi maka kreditur penerima jaminan fidusia tidak memiliki hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya, sehingga untuk mengajukan tagihannya dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren.

## **B. Saran**

Untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur penerima jaminan fidusia dalam hal Debitur dinyatakan Pailit, perlu diatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya penegasan mengenai masa penangguhan hak untuk melaksanakan eksekusi bagi kreditur separatis, termasuk penerima jaminan fidusia dengan tidak mengkaitkannya dengan masa insolvensi, mengingat obyek Jaminan Fidusia merupakan benda yang mudah berpindah tangan. Dengan demikian lembaga jaminan harus dihormati oleh Undang-undang Kepailitan.
2. Perlu diperhatikan kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia dalam proses kepailitan mengingat dalam hal obyek jaminan fidusia tidak ada lagi, maka dalam menggunakan tagihan berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Dengan demikian perlu perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dalam proses kepailitan. Karena dalam pembebanan obyek jaminan fidusia harus melalui prosedur yang ditentukan dari biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan akta dan pendaftaran.
3. Pembatasan jangka waktu bagi kreditur penerima jaminan fidusia dalam melaksanakan sendiri haknya untuk mengeksekusi barang jaminan sebaiknya diperpanjang jangka waktu 2 (dua) bulan yang ditentukan. Saat ini dianggap tidak memperhatikan/ mendukung praktek perbankan.
4. Kreditur penerima jaminan fidusia agar diberikan hak sama dalam kreditur tanpa melepaskan hak preferennya, sehingga dapat secara bersama-sama dengan kreditur lain melakukan restrukturisasi atau perdamaian dengan debitur Pailit.

## Daftar Pustaka

- Badruzaman, Mariam Darus, **Bab Tentang Kredit Verband, Gadai dan Fiducia**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
- Fuady, Munir, **Jaminan Fidusia**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir, **Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek**, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gautama, Sudargo, **Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hadi, Sutrisno, **Metode Research Jilid 1**, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2000.
- Mardelis, **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Mulyadi, Kartini, **Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan, Makalah Seminar tentang perubahan atas UU Kepailitan**, Jakarta : pusat pengajian Hukum, 1998.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, **Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT**, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2005.
- Satrio, J, **Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, Cet I, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soekamto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum UI Press**, Jakarta : 1986.
- Sitomorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, **Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi**, Jakarta : Pireka Cipta, 1993.
- Tiong, Oey Hoey, **Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, **Jaminan Fidusia**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan T.Tjicirosudibyo, Cet.8 Jakarta : Pradya Paramitha, 1976.

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 **tentang Jaminan Fidusia.**

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, **tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah**

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000, **Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia.**

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, **Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**